

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat jangka panjang yang sulit diatasi hingga saat ini. Negara berkembang maupun negara maju tidak bisa benar-benar lepas dari masalah kemiskinan. Teori Ragnar Nurkse (1953) dalam Amalia (2022:224), menjelaskan kegagalan dalam pembangunan yang terjadi di berbagai negara disebabkan karena masyarakat atau negara tersebut terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (*Vicious of circle poverty*). Todaro & Smith (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan muncul karena adanya sejumlah penduduk yang tidak mampu untuk memperoleh sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Menurut Kuncoro (1997:103), kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Permasalahan kemiskinan ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu jumlah pengangguran yang semakin tahun semakin bertambah tanpa diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, upah kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup, dan kualitas hidup masyarakat yang rendah (Prayoga et al., 2021).

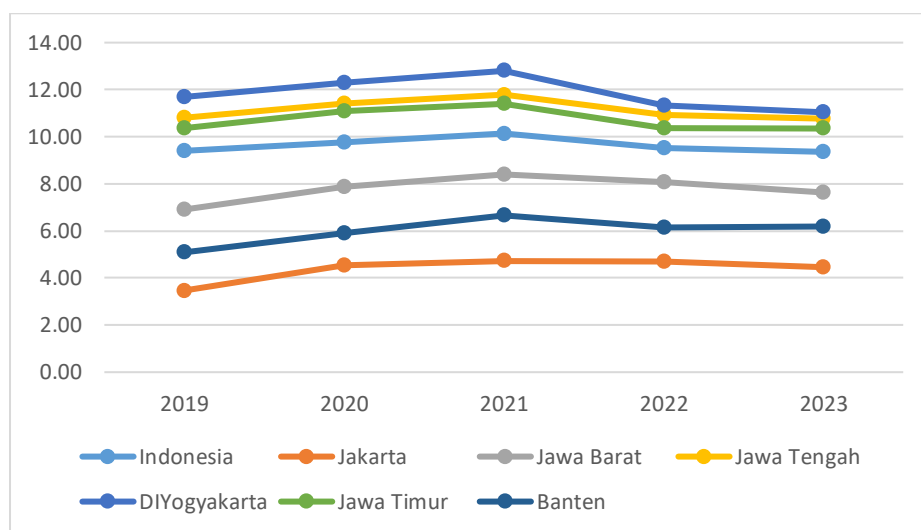
Indonesia sebagai bagian anggota dari PBB yang menyepakati 17 program *Sustainable Development Goals* (SDG's), yang artinya secara tidak langsung dituntut agar dapat mencapai target pembangunan yang telah dituangkan dalam deklarasi SDG's tersebut (Adhitya et al., 2022). Tujuan utama dalam pencapaian

SDGs yaitu menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut, SDGs fokus pada beberapa aspek utama seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Aspek pendukung seperti air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan kerjasama global juga diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Amirya & Irianto, 2023).

Menurut Sinurat (2023) tingkat kemiskinan yang dialami oleh suatu negara atau wilayah merupakan gambaran dari kualitas kesejahteraan masyarakat yang tinggal di negara atau wilayah tersebut. Hampir semua daerah di Indonesia mengalami kemiskinan, seperti halnya Pulau Jawa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih dihindangi oleh masalah kemiskinan dimana sejumlah 25,90 juta orang termasuk dalam kategori miskin pada tahun 2023, yang dimana pada Pulau Jawa sendiri terdapat 13, 62 juta orang miskin pada tahun 2023. Artinya lebih dari setengah jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa.

Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan ibukota, ini membuat Pulau Jawa lebih unggul daripada pulau lainnya. Sebagai pusat ekonomi utama di Indonesia, Pulau Jawa bukan hanya memegang peran sentral dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi nasional. Tantangan kemiskinan di Pulau Jawa tidak hanya menjadi masalah lokal, melainkan juga meresap ke dalam seluruh struktur sosial dan ekonomi di negeri ini (Maulana & Desmawan, 2023)

Pulau Jawa memiliki 6 provinsi diantaranya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Pada provinsi-provinsi tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda, berikut merupakan grafik tingkat kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2019-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (Persen)

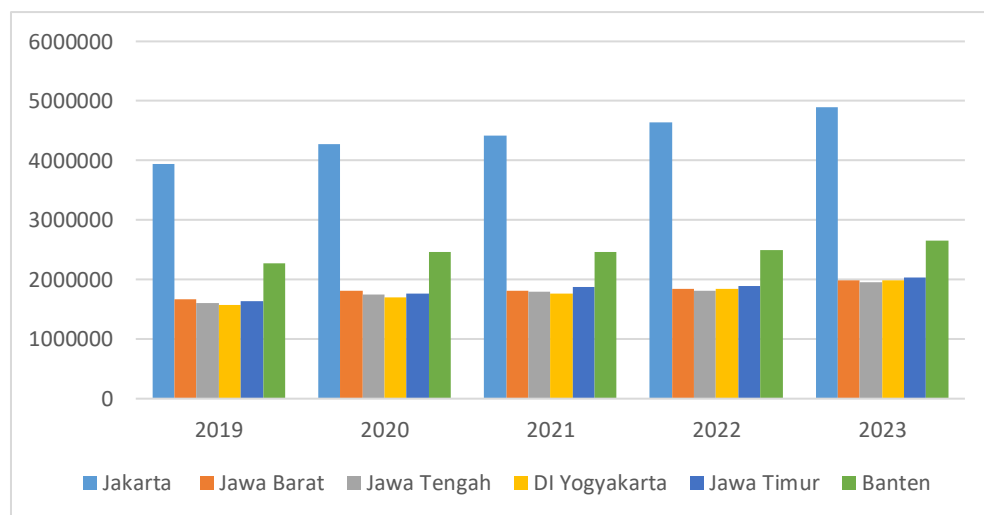
Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan lima tahun terakhir pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan dikarenakan adanya wabah covid-19 yang membuat beberapa lapangan usaha mengalami kerugian dan menyebabkan terjadinya pengurangan tenaga kerja sehingga angka kemiskinan meningkat. Pada tahun 2022-2023 tingkat kemiskinan menurun, walaupun cenderung menurun tingkat kemiskinan di Pulau Jawa belum kembali ke angka kemiskinan sebelum adanya pandemi covid-19 dan terdapat beberapa Provinsi yang tingkat kemiskinannya berada di atas angka tingkat

kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan paling tinggi setiap tahunnya berada di Provinsi DI Yogyakarta dengan tingkat kemiskinan tahun 2023 sebesar 11,04 persen. Disusul Provinsi Jawa Tengah untuk presentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 10,77 persen. Provinsi Jawa Timur dengan presentasi penduduk miskin tertinggi selanjutnya sebesar 10,35 persen, lalu Jawa Barat sebesar 7,62 persen dan DKI Jakarta 4,44 persen dengan persentase penduduk terendah.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah upah minimum. Menurut Todaro & Smith (2014), adanya penetapan upah minimum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upah minimum merupakan upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaannya. Setiap wilayah di Indonesia memiliki tingkat upah minimum yang berbeda-beda sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi masing-masing. Upah minimum menjadi salah satu kebijakan efektif untuk menekan kemiskinan karena akan memberikan distribusi pendapatan yang merata antara perusahaan dan pekerja. Dengan memastikan semua pekerja mendapatkan gaji yang layak, dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Deris et al., 2023). Oleh karena itu upah minimum diindikasikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deby Oktaviana (2021) yang menghasilkan upah minimum berpengaruh negatif. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan & Ikhsan (2018) yang menghasilkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian upah minimum yang semakin tinggi dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh pada kesejahteraan dan pada akhirnya terbebas dari kemiskinan.

Penelitian juga dilakukan oleh Sutikno (2019) namun memiliki hasil yang berbeda, upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut mungkin terjadi apabila tingkat penawaran tenaga kerja melebihi tingkat permintaan tenaga kerja yang berdampak pada pengangguran dan menimbulkan kemiskinan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Deris (2023) menghasilkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

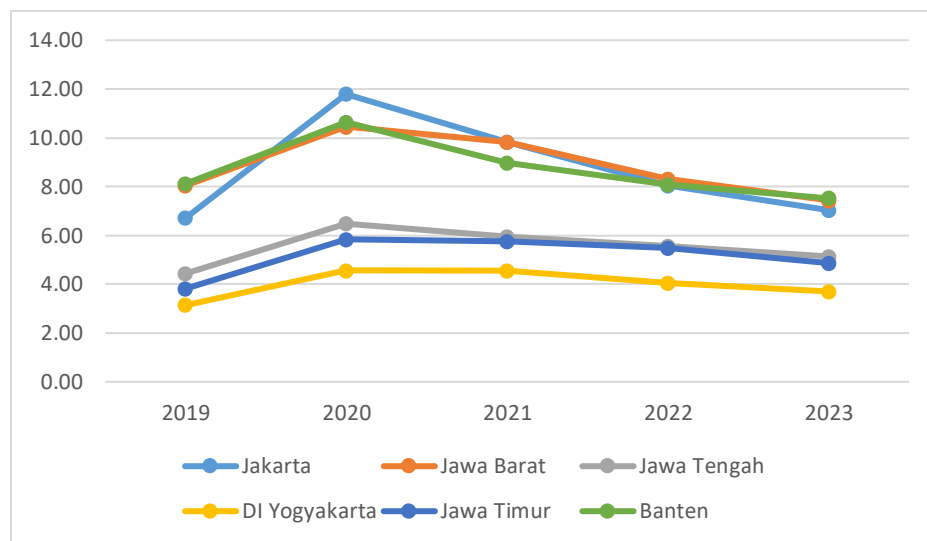
Gambar 1. 2 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa upah minimum di Pulau Jawa dari tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun upah minimum yang ditetapkan pemerintah mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi pemerintah provinsi di pulau Jawa masih menetapkan upah minimum di bawah rata-rata upah minimum nasional, kecuali pada Provinsi Jakarta. Pada

Provinsi Jakarta tahun 2023 sebesar 4,9 juta rupiah dan upah minimum nasional berada di angka 2,9 juta rupiah, itu artinya upah minimum Jakarta dapat dikatakan tinggi di bandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. UMP di Jakarta tinggi disebabkan karena kebutuhan layak hidup yang sangat tinggi. Sementara pada provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Banten merupakan provinsi yang mempunyai upah minimum di bawah rata-rata nasional setiap tahunnya. Pada tahun 2023 Banten sebesar 2,6 juta rupiah, Jawa Timur 2 juta rupiah, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebesar 1,9 juta rupiah dan di posisi terakhir yakni D.I Yogyakarta dengan UMP sebesar 1,8 juta rupiah.

Tingkat pengangguran juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang di capai oleh seseorang. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya (Buswari et al., 2023). Hal ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Maryam Batubara, Lutfiah N & Miftah R (2023) yang menghasilkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Putri & Hutabarat (2024) juga menghasilkan kesimpulan yang sama dalam penelitiannya bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ihsan & Ikhsan (2018) memiliki hasil yang berbeda, yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Deby Oktaviana (2021) menghasilkan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

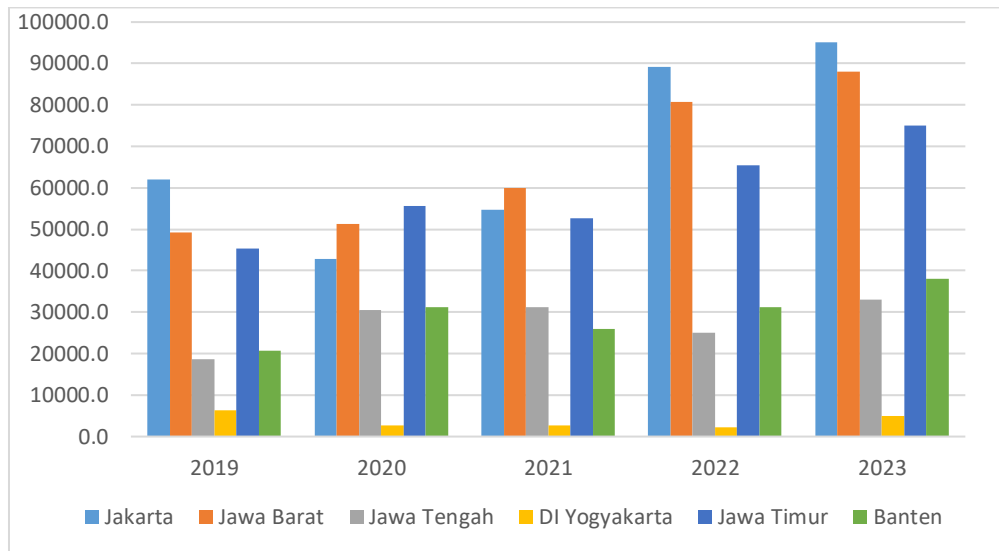
Gambar 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.3 tingkat pengangguran di pulau Jawa pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dan penurunan, terutama pada tahun 2020-2021 sebagai akibat dari adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian semakin menurun dan banyaknya para pekerja yang di rumahkan maupun di PHK karena sebagian perusahaan tidak sanggup membayar para pekerja yang diakibatkan oleh minimnya produksi maupun penjualan selama pandemi berlangsung. Pada tahun 2022-2023 tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa menurun dikarenakan ekonomi di Pulau Jawa mulai kembali pulih setelah adanya

pandemi. Pada tahun 2023 Tingkat pengangguran di Banten sebesar 7,52 persen, Jawa Barat sebesar 7,44, Jakarta 7,05, Jawa Tengah sebesar 5,13 persen, Jawa Timur sebesar 4,88 persen dan tingkat pengangguran terendah di Pulau Jawa berada di Provinsi DI Yogyakarta dengan angka 3,69 persen.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kemiskinan yaitu investasi. Menurut Sukirno (2000), investasi dapat mengakibatkan peningkatan produksi dan memberikan peluang pekerjaan baru. Dengan adanya peluang kerja yang lebih banyak dan meningkatkan pendapatan, pada akhirnya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan (Ichwanul Eka., & Widowati K, 2024). Jika masyarakat memiliki pendapatan yang meningkat, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan akan berkurang (Maulani Nisa et al., 2023). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Hutabarat (2024) yang menghasilkan bahwa investasi PMDN berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sutikno (2019) memiliki hasil yang sama bahwa investasi PMDN berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan

Namun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Andri Adi P, Indi Laila & Deris (2022) memiliki hasil yang berbeda, penelitiannya menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan gambar 1.4 terlihat bahwa realisasi investasi penanaman modal dalam negeri pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2023 selalu mengalami kenaikan, walaupun pada Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Banten mengalami penurunan tetapi pada tahun 2023 kembali naik.



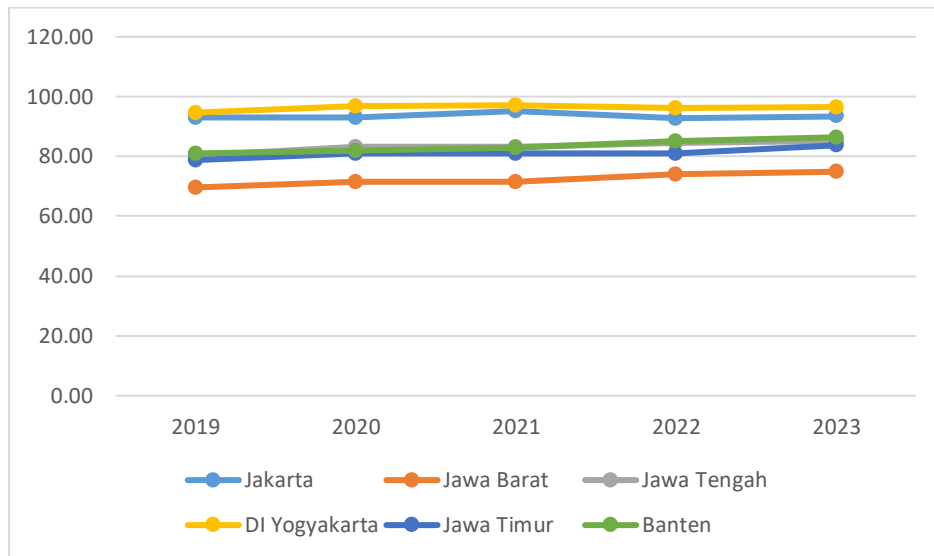
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Gambar 1. 4 Realisasi Investasi PMDN di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik nilai investasi di Pulau Jawa pada tahun 2023 mencapai 334126.8 miliar atau 49 persen dari total seluruh realisasi investasi PMDN yang ada di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa investasi PMDN terpusat di Pulau Jawa. Menurut BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pulau Jawa menjadi tujuan utama investor karena pasar yang besar dan infrastruktur yang bagus. Walaupun investasi PMDN terpusat di Pulau Jawa tetapi tidak terdistribusi secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari Provinsi DI Yogyakarta dengan investasi PMDN yang paling rendah, tingkat kemiskinannya pun tertinggi di Pulau Jawa. Nilai realisasi yang besarpun tidak sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk miskin yang ada di Pulau Jawa

Selain upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan investasi, sanitasi juga menjadi faktor yang memiliki pengaruh dalam kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan keterkaitan antara sanitasi dan lingkungan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kesehatan individu (Nur Azizah et al., 2022). Menurut World Health Organization (WHO) sehat didefinisikan sebagai suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang dapat memungkinkan individu hidup secara produktif baik dalam aspek sosial maupun aspek ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi harus didukung dengan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang baik. Sanitasi menjadi salah satu faktor utama dalam upaya perwujudan layanan yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas (Miswan et al., 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhitya (2022) yang menghasilkan kesimpulan bahwa sanitasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur azizah (2022) yang menghasilkan bahwa sanitasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Andika & Evi (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa sanitasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Dari gambar 1.5 terlihat bahwa secara keseluruhan selama periode 2019-2023 angka presentasi sanitasi layak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya pada seluruh Provinsi di Pulau Jawa, hal tersebut menggambarkan bahwa terjadi pembangunan dan perbaikan bidang sanitasi yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Gambar 1. 5 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tahun 2019-2023 (Persen)

Presentasi sanitasi paling tinggi setiap tahunnya berada di DI Yogyakarta. Pada tahun 2023 presentase sanitasi di DI Yogyakarta mencapai 96,42 persen, lalu di susul DKI Jakarta dengan presentase 93,51 persen, selanjutnya Banten dengan presentase 86,41 persen, Jawa Tengah dengan presentase 85,21 persen dan Jawa Barat dengan presentase 74,88 persen. Jawa Barat merupakan Provinsi dengan presentase paling rendah di Pulau Jawa setiap tahunnya.

Penulis menemukan beberapa kajian empiris yang relevan dengan penelitian ini. Terjadi inkonsisten antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, terdapat hasil yang sesuai dengan teori, namun ada pula yang hasilnya paradoks. Oleh karena itu penulis menjadikan perbedaan-perbedaan hasil penelitian tersebut sebagai celah penelitian. Selain itu penulis mengidentifikasi bahwa variabel sanitasi merupakan variabel yang belum banyak diteliti kaitannya dengan kemiskinan khususnya di Pulau Jawa sehingga variabel ini penting untuk diteliti.

Dari fenomena dan studi empiris yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menganalisis kemiskinan di Pulau Jawa dengan periode waktu penelitian tahun 2015-2023. Penelitian ini akan membahas tentang analisis variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, dengan metode data panel sehingga akan lebih banyak memberikan informasi karena data yang digunakan adalah data *time series* dan *cross section*, oleh karena itu informasi yang didapatkan akan lebih lengkap. Dengan demikian penelitian ini berjudul **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Investasi dan Sanitasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2015-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kemiskinan, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, investasi dan sanitasi di provinsi yang ada di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, investasi dan sanitasi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di pulau jawa tahun 2015-2023?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, investasi dan sanitasi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di pulau jawa tahun 2015-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kondisi kemiskinan, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, investasi dan sanitasi di provinsi yang ada di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, investasi dan sanitasi terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, investasi dan sanitasi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara ilmu maupun praksis yakni sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Kebaruan penelitian ini dapat menggali aspek baru yang belum banyak diteliti yaitu sanitasi. Penelitian ini berkontribusi pada wawasan mengenai bagaimana kondisi sanitasi yang buruk dapat memperparah kemiskinan, dengan mempengaruhi kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praksis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman khususnya tentang pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, investasi, dan sanitasi terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa yang diteliti sehingga menambah wawasan dan pengetahuan.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membuat strategi atau langkah-langkah kebijakan yang tepat terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan di Pulau Jawa.

2. Bagi Pembaca

Memberikan penjelasan, pengetahuan, dan sumber referensi hubungan pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, investasi dan sanitasi terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2015-2023. Serta dapat digunakan sebagai referensi dan pembanding dengan penelitian selanjutnya

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di enam Provinsi yang ada di Pulau Jawa diantaranya Jakarta, Jawa barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten pada tahun 2015-2023.

